

SEJARAH SINGKAT PERJUANGAN PEMEKARAN PULAU TALIABU MENJADI KABUPATEN DAERAH OTONOMI BARU DALAM PROVINSI MALUKU UTARA

A. Latar Belakang

Lahirnya ide perjuangan Pemekaran Pulau Taliabu menjadi Kabupaten Daerah Otonomi Baru dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, adalah sebuah jawaban atas tuntutan dari suatu kondisi obyektif masyarakat yang dipandang perlu mengembangkan nilai-nilai Nasionalisme yang mengandung semangat kebersamaan hak dan kewajiban dalam tatanan pergaulan sosial, politik, ekonomi.

Dengan tatanan itu, kesempatan membangun hak dan kewajiban yang sama memperoleh kedudukan dalam jenjang dan lini-lini pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sula yang baru berdiri sendiri, pada Tahun 2003, sebagai Daerah Otonomi Baru. Pada kondisi obyektif setelah terpilihnya Putra Taliabu : Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE sebagai Bupati Definitive Pertama Kabupaten Kepulauan Sula dalam pertarungan Politik pada Pilkada pertama Tahun 2005 lalu.

Puncak dari semua itu Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, kemudian sempat dinon-akifkan dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, selama beberapa bulan yang

imbasnya terasa sangat menusuk nurani putra-putri Taliabu yang duduk di lini legislatif maupun lini-lini eksekutif. Dalam konteks inilah Bapak Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE (Bupati Non Aktif saat itu) mengundang masing-masing : Bapak Rusman Dg Matille, BA dan Mesakh Rette, SH yang keduanya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula saat itu.

Ditengah perbincangan di dalam ruangan kerja itu, suasana di sejumlah ruas jalan protokol Kota Sanana terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang mengecam Bupati secara pribadi maupun keluarga. Hingga suasana cukup tegang dan rawan, di tengah aksi demonstrasi tiga tokoh putra Pulau Taliabu itu, melahirkan konsep dan merencanakan Deklarasi Perjuangan Pemekaran Pulau Taliabu.

Dimana pertemuan pada Rabu 26 Juli 2006 itu, Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE. Menegaskan bahwa "**TALIABU HARUS MENJADI KABUPATEN**". Ide dan Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti pada Jumat 28 Juli 2006 di Manado kediaman Bupati yang terletak di Wenang Permai dengan dihadiri oleh : Bapak Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE (Pengarah), Rusman Dg Matille, BA, Mesakh Rette, SH, Syamsuddin La Djupa, Kisman Jannu, SE dan Abd. Kadir Nur Ali, SE (Dero).

Hasil pertemuan itu Wenang Permai ditetapkan Selasa 1 Agustus 2006, akan di-DEKLARASI-kan Perjuangan Pemekaran

Pulau Taliabu yang bertempat di Bobong Ibukota Kecamatan Taliabu Barat. Untuk memobilisasi masyarakat Taliabu ke Bobong, Bapak Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, memerintahkan Hi. Zainal Mus, S.Pd, dengan dibantu para Camat Se-Taliabu, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat. Alhasil ribuan masyarakat dari Selatan hingga Barat dan Timur memadati Gedung MTQ Bobong dan halaman sekitarnya mengikuti acara Deklarasi tersebut.

Untuk mempermudah gerakan masyarakat, kemudian Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE menugaskan enam orang berperan dalam deklarasi tersebut diantaranya ; Hi. Zainal Mus, S.Pd, Rusman Dg Matille, BA, Mesakh Rette, SH, Syamsuddin La Djupa dan Kisman Jannu, SE serta Ir. La Ode Muhuri.

B. Tahap Perjuangan

1. Tahap Perjuangan di Tingkat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula

Pada Deklarasi yang berlangsung Selasa 1 Agustus 2006, di Gedung MTQ Bobong dan halaman sekitarnya itu terjadi dua Keputusan bersama yaitu ;

1. Masyarakat Taliabu menuntut agar Pulau Taliabu segera dimekarkan menjadi Kabupaten Baru.

2. Menggalang semua aspirasi, potensi, langkah dan semangat rakyat bersama Bapak Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE. Memperjuangkan keinginan rakyat ini kepada Pemerintah Pusat melalui DPRD, Bupati dan Gubernur Maluku Utara.

Dalam tahapan penyampaian aspirasi masyarakat Pulau Taliabu itu, melalui Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana amanat PP Nomor 129 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah. Maka Kamis 14 September 2006, secara resmi menyampaikan Aspirasi Masyarakat Taliabu, kepada DPRD Kabuapten Kepulauan Sula yang diterima langsung Ketua DPRD Dahlan Samuda, SP. Merespon keinginan masyarakat Pulau Taliabu, kemudian DPRD mengeluarkan surat nomor 172.3/17/DPRD-KS/2006, tentang Pembentukan Pansus Pemekaran Pulau Taliabu yang dipimpin oleh Efendi Gailea, SE. Pada Kamis 30 November 2006.

Setelah melakukan kajian lapangan yang dilakukan tim teknis Pemkab Kepulauan Sula dan Tim Pansus DPRD Kepulauan Sula di Pulau Taliabu, maka Selasa 17 Juli 2007 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, mengeluarkan Keputusan persetujuan Pemekaran Pulau Taliabu berdasarkan surat Nomor 172.3/12/DPRD-KS/2007, melalui sidang paripurna dan selanjutnya dikembalikan ke Bupati untuk disetujui usulan

Aspirasi Masyarakat Pulau Taliabu itu. Saat itu Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, yang telah mendapat masukan bahwa Pemekaran Pulau Taliabu telah sesuai dengan PP 129 Tahun 2000, maka Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, mengeluarkan keputusan dengan nomor surat 173/KPTS.08/KS/2007, Tentang Persetujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu. Pada Senin 20 Agustus 2007.

2. Tahap Perjuangan di Tingkat Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Setelah Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, menyetujui usulan Kabupaten Pulau Taliabu, maka pada Rabu 12 September 2007, Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, kembali mengeluarkan surat nomor 174.1/KPTS.08/KS/2007, tentang usulan Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu, ke DPRD Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi. Surat permohonan dari Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, kemudian didisposisi pada medio September 2007 oleh Gubernur Maluku Utara kepada Sekprov Maluku Utara yang dijabat oleh Drs. Hi Muhajir Albaar, M.Si.

Namun, disposisi surat usulan tersebut, dibiarkan begitu saja di sebuah meja kecil di ruang kerja Sekprov. Lalu, Bupati

Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, menugaskan tiga pejabat di Kabupaten Kepulauan Sula, masing-masing; Drs Safrin Gailea, Kepala BAPPEDA yang juga Ketua Tim Tehnis Pemda Kepulauan Sula, Jufri Syahrudin, SSTP, M.Si, saat itu menjabat Kabag Organisasi dan Bambang Fataruba, SSTP saat itu menjabat Kabag Pemerintahan, mendapat kendala ketiganya kembali Sanana dan mengajak Irwan Mansur, SH, yang saat itu menjabat Kabag Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula untuk membantu melakukan pendekatan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk bisa mengcross-cek surat usulan yang telah didisposisi Gubernur Maluku Utara itu.

Akhirnya, pada Medio Desember 2008 mereka berempat berangkat ke Ternate untuk sekretaris Pribadi Gubernur Maluku Utara Rahmat Masagus atas bantuan sepri dalam membongkar sejumlah buku-buku ekspedisi surat Gubernur Maluku Utara. Dalam buku itu tertulis isi disposisi "***agar dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku***". Setelah mengetahui surat usulan yang dibuat sejak Tahun 2007 itu, kemudian Irwan Mansur, SH, menghubungi Sekretaris Pribadi Sekprov Maluku Utara bernama Rudianto Buamona. Dia membenarkan kalau surat disposisi Gubernur Maluku Utara, terkait dengan usulan Pemekaran Pulau Taliabu itu, telah berada di Sekprov. Namun,

karena banyaknya pihak terkait melakukan tekanan agar tidak ditindaklanjuti untuk dilakukan proses atas usulan Pemekaran Pulau Taliabu itu. Maka Sekprov tidak menindaklanjutinya.

Setelah berhasil mengambil berkas dari Sekprov, maka berkas tersebut kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan ketentuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

C. Pengajuan Kembali Usulan Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pengajuan kembali berkas usulan Pemekaran Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli dilakukan kembali berdasarkan surat Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, nomor 135.1/026/XII/KS/2008, tertanggal 23 Desember 2008, kepada DPRD Provinsi. Maka Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, menugaskan tiga Kepala Bagian Setda Kabupaten Kepulauan Sula masing-masing; Jufri Syahrudin, SSTP, M.Si, saat itu menjabat Kabag Organisasi dan Bambang Fataruba, SSTP saat itu menjabat Kabag Pemerintahan dan Irwan Mansur, SH, Kabag Hukum. Berkas tersebut diterima langsung oleh

Ketua DPRD Provinsi, selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi nomor : 07/KPTS/P.DPRD/MU/IV/2009, tertanggal 15 April 2009, tentang tentang persetujuan nama, cakupan wilayah dan ibukota calon Kabupaten Pulau Taliabu. Namun, Jumat 17 April 2009, putusan itu kemudian diprotes habis-habisan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDIP Dr. Amin Drakel, S.POG, yang merupakan perwakilan Dapil Kepulauan Sula. Dengan Protes itu, kemudian Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan paripurna untuk mendengarkan pandangan-pandangan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara.

Pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu juga perlu diketahui selama bulan Mei sampai dengan Juli 2009 tiga kali melakukan usulan kepada Gubernur Maluku Utara dengan nomor surat yang berbeda Rabu, 27 Mei 2009, dengan nomor surat 126.1/KS/V/2009, surat kedua dengan nomor 009/140/KS/VI/2009, pada Selasa 16 Juni 2009. Kemudian Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, mengirim surat ketiga pada Senin 20 Juli 2009, dengan nomor 74.2/KPTS.07/KS/V/2009, surat ketiga ini mendapat respon dengan surat nomor 125/887, tentang Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Terkait Usulan Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu yang ditandatangani Sekprov atasnama Gubernur Maluku Utara.

Setelah itu, Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, menugaskan tiga Kepala Bagian Setda Kabupaten Kepulauan Sula, untuk melakukan koordinasi, Konsultasi dengan pemerintah provinsi, selain itu juga menyiapkan semua administrasi perlengkapan persyaratan usulan pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu yang dibawah kendali dan pengawasan Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE.

Pada September 2009, Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE yang bertugas di Jakarta menugaskan Irwan Mansur, SH, untuk membawa rekomendasi dari DPRD Provinsi ke Jakarta dan langsung menuju Hotel Saripan Pasifik di ruang loby hotel sejumlah kalangan yang ingin menggagalkan pertemuan Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, beserta Gubernur itu bertebaran. Tetapi keduanya berhasil menemui Gubernur setelah melewati pintu darurat Hotel Saripan Pasifik menuju lantai 18 kamar 18, setelah bertemu dan terjadi percakapan kedua Pejabat itu. Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, memerintahkan Irwan Mansur, SH, untuk menyodorkan hasil rekomendasi serta surat usulan ke Menteri Dalam Negeri yang telah dikeluarkan pihak Sekretariat Provinsi Maluku Utara, pada Selasa 1 September 2009, dengan nomor 135/1137, tentang usulan pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli. Setelah ditandatangani Gubernur Provinsi Maluku Utara. Bupati Hi.

Ahmad Hidayat Mus, SE langsung mengucapkan kata SYUKUR ALHAMDULLILAH sebanyak tiga kali berturut-turut.

D. Perjuangan di Tingkat Pusat

Setelah mendapatkan surat persetujuan tersebut, kemudian Bapak, Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, menugaskan lagi Jufri Syahrudin, SSTP, M.Si dan Irwan Mansur, SH, untuk mengawal koordinasi, Konsultasi dengan pemerintah provinsi, selain itu juga menyiapkan semua administrasi perlengkapan persyaratan usulan pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri serta Departemen terkait di Jakarta dan setiap saat diawasi Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, untuk mendapat arahan terkait administrasi keduanya melakukan konsultasi dengan Drs. Sugeng Harijono, M.Si. Sedangkan, untuk di Kabupaten dipercayakan kepada Hi. Syafi Pauwah, SH.

Sejarah juga mencatat bahwa sebagai aktor intelektualnya, Bapak, Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE dalam memperjuangkan Pemekaran Pulau Taliabu yang tak kenal lelah tentunya sejumlah tokoh ikut serta berpartisipasi dalam menunggu perintah dari Bupati diantaranya ; Di Jakarta terdapat nama Hj. Nurohmah Mus istri yang selalu memperjuangkan Pulau Taliabu, Anggota DPR RI DR. Hi. Ali Mochtar Ngabalin, Aliong Mus, ST dan Jainal Mus, SE selaku

pengusaha. Selain itu juga sejumlah tokoh baik yang tua maupun yang muda ikut membantu diantaranya ;

1. Hi. Dahlan Samuda, SP, Ketua DPRD Periode 2004-2009
2. Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hi. Syafi Pauwah, SH
3. Semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2004-2009
4. Tim Eksekutif Pemda Kabupaten Kepulauan Sula
5. Tim Tehnis Pemda Kabupaten Kepulauan Sula
 - Drs. Safrin Gailea, Ketua Tim Tehnis Pemekaran Pulau Taliabu Mangoli
 - Jufri Syahrudin, SSTP, M.Si
 - Bambang Fataruba, SSTP
 - Irwan Mansur, SH
6. Hi. Zainal Mus, S.Pd, Ketua DPRD Periode 2009-2014
7. Semua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2009-2014
8. Efendi Gailea, SE, Ketua Pansus Pemekaran
9. Rusman Dg Natille, BA
10. Ma'ruf, SE (saat Menjabat Camat Talbar)
11. Para Camat Se- Pulau Taliabu
12. Para Kades Se- Pulau Taliabu
13. Para Imam Se- Pulau Taliabu
14. Para Ketua BPD Se- Pulau Taliabu

15. Seluruh Rakyat Pulau Taliabu
16. Seluruh Rakyat Pulau Mangoli
17. Seluruh Rakyat Pulau Sula Besi
18. Para kepala Dinas, Badan dan Seluruh Aparat Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula

C. Tahap Persiapan Instansi Pemerintahan di Bobong

Tahapan ini kita harus mengungkapkan kembali perjalanan pemerintahan sejak Kabupaten Maluku Utara, dimana Kabupaten Kepulauan Sula hanya terdapat tiga Kecamatan yaitu ;

1. Kecamatan Sanana Ibukota Sanana
2. Kecamatan Taliabu Barat Ibukota Bobong
3. Kecamatan Taliabu Timur Ibukota Dofa

Perkembangan pemerintahan selanjutnya sampai pada kurung waktu Tahun 2002, Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Tiga Kecamatan lagi masing-masing;

1. Kecamatan Taliabu Selatan Ibukota Losseng
2. Kecamatan Mangoli Timur Ibukota Waitina
3. Kecamatan Sula Besi Ibukota Kabau

Pada tahun 2003 sejak disyahkan Undang-undang No 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halbar, Halsel, Haltim, Halut, Kabupaten Kepulauan Sula dan Koa Tidore

Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Secara administrasi maka Pulau Taliabu terdapat Dua Kecamatan yang membawahi 50 Desa definitif yaitu ; Kecamatan Taliabu Barat di Bobong dan Kecamatan Taliabu Selatan di Loseng. Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE yang mengetahui dan merasakan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat terkesan cukup berat. Apalagi saat itu, infrastruktur dan kondisi transportasi perhubungan yang belum memadai. Maka pada Tahun 2006 sampai 2011 secara berlahap pemerintah melakukan berbagai perubahan terutama dalam pembentukan Desa dan Kecamatan. Hingga akhir Tahun 2012 di Pulau Taliabu berhasil membentuk Delapan Kecamatan dan 72 buah Desa. Adapun Kecamatan tersebut adalah ;

1. Kecamatan Taliabu Barat di Bobong
2. Kecamatan Taliabu Barat Laut di Nggele
3. Kecamatan Lede di Lede
4. Kecamatan Taliabu Utara di Gela
5. Kecamatan Taliabu Timur di Samuya
6. Kecamatan Taliabu Timur Selatan di Loseng
7. Kecamatan Taliabu Selatan di Pancadu
8. Kecamatan Tabona di Tabona

D. Pembangunan Kota Bobong

Pembangunan Kota Bobong dimulai sejak tahun 1971 ketika Camat Taliabu Barat Bapak A.D. Ruray, BA, memindahkan Ibukota Kecamatan dari Kawalo Ke Bobong. Dimana peletakan batu pertama proses pembangunan di Bobong diresmikan Gubernur Maluku Bapak Sumitro, meskipun perumahan masyarakat baru hanya sekitar ± 20 unit rumah.

Kemudian Camat A.D. Ruray, BA bersama 20 Kepala Rumah Tangga yang dikoordinir Kepala Desa Gela Muh. Taher Mus mengembangkan dan membangun perumahan dinas pegawai, perkantoran dan gedung SD, SMP dan SMA. Setelah berakhirnya jabatan Camat A.D. Ruray, BA, kemudian digantikan E. Wemay, BA hingga M.Z. Azief, BA, masih melakukan program pembangunan dan penataan Kota Bobong pada saat itu.

Perkembangan demi perkembangan wilayah, kemudian Tahun 2003 terbentuklah Provinsi Maluku Utara yang salah satunya Kabupaten Kepulauan Sula, dinobatkan dalam konteks Pilkada Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, sebagai Bupati Definitive pertama Kabupaten Kepulauan Sula. Hasil jerih payah sang ayah kemudian dilanjutkan dengan memprioritaskan pembangunan ke Pulau Taliabu sebagai bukti kecintaan terhadap masyarakat Taliabu sebagai daerah kelahirannya. Dalam kaitan proses

percepatan pembangunan infrastruktur dalam penataan Kota Bobong kemudian Bupati Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, menugaskan dua staf ahli yang membantu Camat Bobong diantaranya; Suryadharna Umacina, S.Ip, sebagai Staf Khusus Bidang Pemerintahan dan Pembangunan dan M. Saleh Masuku, SE, sebagai Staf Khusus Bidang Kesra.

E. Tahapan Proses Pengesahan UU Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu

Audensi Komisi II DPR RI dan Tokoh Masyarakat Pulau Taliabu di Jakarta, Pada Senin 01 Agustus 2011, dimana dalam audensi itu, dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bupati Kepulauan Sula, Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hi. Syafi Pauwah, SH, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Hi. Zainal Mus, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Aliong Mus serta sejumlah tokoh masyarakat, Agama, Pemuda Taliabu Barat yang dipimpin Ma'ruf selaku Camat Taliabu Barat pada saat itu. Audensi yang berhasil dengan kesepakatan dari Gubernur Maluku Utara dan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara untuk memberikan dukungan dan respon atas perjuangan Pemekaran Pulau Taliabu yang di motori Bapak, Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE. Dan saat itu juga Bupati Kepulauan Sula selaku pembicara memaparkan tentang kondisi Geografis, Demografis serta

potensi aktual untuk mendukung upaya pemekaran Pulau Taliabu menjadi Daerah Otonomi Baru di Maluku Utara. Bahkan juga kajian Akademik dari Universitas Briwijaya diserahkan kepada Jufri Syahrudin yang ikut mendampingi tim kajian akademik terhadap Pulau Taliabu. Sedangkan, pembicara dalam audensi saa itu terdiri dari ;

1. Gubernur Maluku Utara Hi. Thaib Armaiyn
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara
4. Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE
5. Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hi. Syafi Pauwah, SH.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Hi. Zainal Mus, S.Pd
7. Tokoh Masyarakat Taliabu Hi. Rusman Dg Matille, BA
8. Camat Taliabu Barat Ma'ruf, SE

Peserta audensi pada Senin 01 Agustus 2011, selain anggota DPR RI dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang dipimpin Aliong Mus, turut hadir diantaranya :

1. Sekprov Maluku Utara
2. Sekda Kabupaten Kepulauan Sula
3. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara
4. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula
5. Tokoh Masyarakat dan Agama
6. Tokoh Pemuda

Peninjauan Komisi II DPR RI Ke Bobong

Dari hasil audensi itu, kemudian DPR RI melalui Komisi II dengan dipimpin oleh Nurul Arifin melakukan kunjungan di Bobong dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di wakili Wakil Bupati Hi. Syafi Pauwah, SH, pada Sabtu 16 Juni 2012, sekaligus melakukan tatap muka bersama masyarakat Pulau Taliabu. Dimana dalam kunjungan tersebut tim Komisi II melihat langsung kelayakan Desa Bobong dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten Pulau Taliabu.

Tim yang terdiri dari tiga fraksi diantaranya Fraksi PKS, Demokrat dan Golkar. Mereka di dampingi oleh Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE. Dari hasil kunjungan itu, kemudian Nurul Arifin selaku Ketua TIM Komisi II DPR RI, menilai Pulau Taliabu layak menjadi Daerah Otonomi Baru dan Bobong layak sebagai Ibukota Kabupaten.

Peninjauan TIM DPOD Kementerian Dalam Negeri Ke Bobong

Setelah kunjungan Komisi II DPR RI, kemudian Sabtu 24 November 2012, tim DPOD Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan ke Pulau Taliabu yang dipusatkan di Bobong terdiri dari Sugeng Haryono, Slamet Endarto dan Samuel, dalam kunjungan itu selain melakukan pertemuan dengan masyarakat yang diisi antaranya pernyataan sikap

Tokoh Masyarakat Taliabu yang dibacakan Hi Rusman Dg Maitte dan Penghibaan Tanah maupun tempat tinggal untuk dijadikan Kantor dibacakan Ma'ruf selaku pemerintah Kecamatan, tim juga melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi yang akan dijadikan perkantoran Kabupaten Pulau Taliabu.

Setelah kembali tim DPOD Kementerian Dalam Negeri RI, Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, kembali diundang untuk melakukan paparan dan penjelasan hasil kunjungan serta perbaikan data yang berlangsung Jumat 7 Desember 2012, dipusatkan di Puncak Bogor dan dihadiri oleh Tim Tehnis Pemkab Kepulauan Sula yang terdiri dari; Jufri Syahrudin, S.STP, M.Si, Irwan Mansur, SH, Muchlis Soamole, SH, Fadila Faridin, S.STP, Lutfi Soamangon serta Deny Rahmat Saleh, ST.

Karena persoalan data telah memenuhi PP 78 Tahun 2007, maka Komisi II DPR RI bersama tim DPOD Kementerian Dalam Negeri RI meminta untuk melakukan Lobby Politik, setelah Rancangan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012, tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru berjumlah sembilan daerah termasuk Kabupaten Pulau Taliabu. Dipari murnakan, maka kurung waktu dua hari terhitung Rabu 12 sampai dengan Kamis 13 Desember 2012, lobby politik terus dilakukan Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE.

Al-hasil, Kamis 13 Desember 2012, Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, bersama Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi, Anggota DPRD Provinsi Aliong Mus, ST, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Hi. Zainal Mus, S.Pd dan tim teknis dari Pemkab Kepulauan Sula diundang kembali untuk melakukan pertemuan di ruang DPR RI Komisi II.

Pada Pertemuan itu, Boki Nita Susanti anggota DPR RI Utusan Provinsi Maluku Utara, mempertanyakan persoalan perbatasan Banggai Kepulauan dan Pulau Taliabu yang juga dihadiri Bupati Banggai Kepulauan dan Ketua DPRD Banggai Kepulauan. Dengan tegas Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, mengaku melepaskan Pulau Masoni dan Pulau Timpaus kepada Pemerintahan Banggai Kepulauan.

Dan Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, meminta kepada Bupati dan Ketua DPRD Banggai Kepulauan agar jangan hanya mengakui Daratannya tetapi Penduduknya ikut diakui. Karena selama ini warga Timpaus masih melakukan pengobatan di Pulau Taliabu. Saat itu, Bupati Banggai Kepulauan berdiri dan memberikan dua jempol ibu jari kepada Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE. Walaupun juga saat itu, Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, mengatakan bahwa persoalan batas ini masih dilakukan kajian di Kementerian Dalam Negeri. Tepatnya Jumat, 14 Desember

2012 sekitar pukul 14.00 WIT Rancangan Undang-undang disahkan menjadi Undang-Undang Otonomi Baru termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, menjadi Kabupaten Baru di Maluku Utara.

Dan puncak perjuangan pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu, pada 22 April 2013, Menteri Dalam Negeri Hi. Gamawan Fauzi Atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melantik Ir. Hi, Arman Sangadji selaku Pejabat Bupati Pulau Taliabu Taliabu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.82-2782 Tahun 2013, tertanggal 19 April 2013, dengan menandatangani Prasasti Kabupaten Pulau Pulau. Kemudian Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE, mengantar Pejabat Bupati Pulau Taliabu ke Bobong dan meletakkan Prasasti di Bundaran Kota Bobong.

Pada Jumat 10 Mei 2013, pukul 22:35:26 WIT, bertempat di Gedung Pertemuan Bobong, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Hi. Zainal Mus, S.Pd, bersama unsur pimpinan melaksanakan paripurna terbuka pengesahan Lambang Daerah Kabupaten Pulau Taliabu **"HEMUNGSIA SIA DUFU"** sebagai lambang Daerah sekaligus penyerahan kepada Bupati Kepulauan Sula Hi. Ahmad Hidayat Mus, SE dan diteruskan kepada Pejabat Bupati Kabupaten Pulau Taliabu disertai dengan pelantikan Sejumlah Pejabat Eselon II

termasuk Pj Sekda Pulau Taliabu yang dijabat Drs. Sugeng Harijono, M.Si, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Maluku Utara Nomor 82.1.2.22/SP/028/2013, tertanggal 24 Juli 2013. Dan pelantikan Drs. Sugeng Harijono, M.Si, sebagai Plh. Bupati Taliabu berdasarkan surat Keputusan Mendagri Nomor : T. 131.82/1754/OTDA, tertanggal 16 April 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janjinya sebagai Pj. Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Ke-2, dan disusul dengan pengambilan Sumpah dan Janji 20 Anggota DPRD Devinitif Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan satu kata ***“HEMUNGSIA SIA DUFU”*** Maka Taliabu Kedepan Pasti Jaya...Insya Allah. Amin

